

DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN/RAHASIA KELURAHAN ROA MALAKA

NO	NAMA/KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PENTINGNYA BAGI PUBLIK		REVIEW
				JIKA DIBUKA	JIKA DITUTUP	
1,	Data Pribadi masyarakat pada Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keliarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelektualitas dan Rekomendas Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b ¹ Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c ¹ Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang;dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dari informasi pribadi penduduk.	baiknya masa retensi tetap ditentukan contoh : sesuai masa retensi penyimpanan arsip
2,	Data Pribadi Pegawai dalam dokumen administrasi dan database sistem informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keliarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelektualitas dan Rekomendas Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.	a. Pasal 85 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan b ¹ Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c ¹ Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang;dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dari informasi pribadi pegawai.	baiknya masa retensi tetap ditentukan contoh : sesuai masa retensi penyimpanan arsip
3	Laporan Hasil Assesment	Pasal 17 huruf h Undang-	Terbuka apabila ada perintah	a. Dapat membuka informasi	Melindungi data dan informasi	baiknya masa retensi tetap ditentukan
4,	Nama Pengguna Kendaraan pada	Pasal 17 huruf c Undang-	Terbuka apabila ada perintah	Dapat membahayakan keamanan	Melindungi keamanan Penjabat	Dasar hukum Pasal 17 huruf i UU 14/2008,
5,	Surat Keterangan Penghasilan	d. Pasal 17 huruf h e. Pasal 17 huruf i Undang-	Terbuka apabila mendapat	Dapat menimbulkan	Melindungi data dan	isi informasinya seperti apa?
6,	Dokumen Hasil Tes Peminatan dan Motivasi dalam rangka proses usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.	a. Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.	C. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan d Dapat mengungkap hasil evaluasi/ seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasikemampuan seseorang dalam rangka	a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan dalam rangka porses usulan pengangkatan dalam jabatan Fungsional.	

				proses usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional		
7,	Nilai hasil ujian Peyesuaian Ijazah	a. Pasal 17 huruf h Undang-	Terbuka apabila mendapat	a. Dapat membuka informasi	a. Melindungi data dan	
8,	Dokumen pelaksanaan Uji kompetensi untuk eselon 2, terdiri dari: 1. Surat undangan tim panitia seleksi; 2. Berita Acara tim panitia seleksi beserta lampirannya; 3. Nota dinas laporan hasil uji kompetensi (jobfit) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 4. Surat usulan/laporan ke Komisi Aparatur Sipil Negara oleh Gubemur; 5. Surat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Gubemur;	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara; dan	a. Terbuka Sampai Surat Pelantikan ditetapkan; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.	a. Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/ pejabat terkait; b. Dapat mengungkapkan hasil evaluasi/ seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang. C. Dapat membuka informasi pribadi seseorang.	a. Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan/pejabat terkait; b. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan c. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	
9,	Dokumen Perpindahan Pegawai Perangkat Daerah di lingkungan Karena kepentingan dinas, terdiri 1. dokumen usulan dan data-data pendukung mutasi; dan 2. draft SK perpindahan	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun Informasi Publik; dan Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara; dan	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang	a. Dapat membuka informasi pribadi b. Dapat mengungkapkan hasil dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi C. Dapat menimbulkan informasi pribadi seseorang	a. Melindungi data dan informasi pribadi b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	konsekuensinya perlu didiskusikan. Untuk SK kalaupun ingin dirahasiakan adalah pada saat Sehingga masa retensinya hanya hingga SK
10,	Dokumen Usulan Verifikasi dan Validasi Jabatan Pelaksana, terdiri dari: 1. Surat Usulan Beserta 3. Berita Acara Hasil Verifikasi	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat mengungkapkan hasil evaluasi/ seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, C. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang	a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	
11,	Dokumen Usulan Evaluasi Kinerja Pegawai Tidak Tetap terdiri dari : 1. Surat Evaluasi kinerja beserta lampirannya 2. Biodata 3. Draft SK Perpanjangan Kinerja Pegawai Tidak Tetap.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat mengungkapkan hasil evaluasi/ seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi C. Dapat menimbulkan	a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	

				seseorang.		
12,	Dokumen Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, terdiri dari : 1. Laporan Pengaduan; 2. Informasi Pelapor Pengaduan; 3 Informasi Terlapor Pengaduan; 4. Bukti Pengaduan 5. Undangan Panggilan pemeriksaan, permintaan keterangan, dan penyampaian rekomendasi;	a. Pasal 17 huruf a dan h Undang Nomor 14 Tahun b. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan evaluasi/ seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi C. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang.	a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan penyusunan kebijakan.	Dasar hukum ditambahkan Pasal 17 huruf a
13,	Dokumen Pengaduan Indisipliner Pegawai, terdiri dari : 1. Pengaduan indisipliner pegawai; 2. Surat Panggilan/Surat Klarifikasi; 3. Tindak Lanjut Pengaduan indisipliner pegawai; 4. Jawaban Pengaduan indisipliner pegawai; 5 Berita Acara Klarifikasi /Pemeriksaan Pengaduan Pegawai;	a. Pasal 17 huruf a dan h 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Undang-Undang Nomor	a. Terbuka apabila ada pemerintahan secara tertulis; b. Terbuka apabila mendapat bersangkutan.	a. Dapat membuka seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi	Melindungi data dan	Dasar hukum ditambahkan Pasal 17 huruf a
14,	Dokumen pelaksanaan Baperjab, terdiri dari; 1. Usulan dan lampiran SKPD; 2. Surat undangan Baperjab untuk ASN yang bersangkutan 3. Berita Acara Baperjab; 4. Nota dinas hasil laporan Baperjab; 5. Nota dinas permohonan melantik;	a. Pasal 17 huruf h dan i b. Undang-Undang Nomor	Sampai Surat Keputusan	Dapat mempengaruhi keputusan	Menjaga objektivitas	Surat undangan kenapa masuk yang
15,	Draft Surat Rekomendasi hibah	Pasal 17 huruf h dan i	a. Sampai surat rekomendasi	Dapat mempengaruhi keputusan	Menjaga objektivitas	
16,	Lembar Disposisi yang menurut	Pasal 17 huruf i Undang-	Terbuka apabila ada perintah	Dapat mengganggu proses	Menjaga objektivitas proses	
17,	Naskah dinas yang menurut	Pasal 17 huruf i Undang-	Terbuka apabila ada perintah	Dapat mengganggu proses	Menjaga objektivitas proses	
18,	Berita Acara Pembahasan RAPBD	a. Pasal 17 huruf i Undang-	a. Terbuka apabila ada	Dapat mengganggu proses	Menjaga objektivitas proses	ketika sudah menjadi APBD/APBD sudah

19,	Dokumen Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN, terdiri dari; 1. Surat Usulan atau pengantar dari SKPD; 2. Surat Panggilan; 3. Surat Tugas Pemeriksaan; 4. Berita Acara Pemeriksaan; 5. Laporan Hasil Pemeriksaan; 6. Nota Dinas Permohonan Disposisi Penjatuhan Hukuman Disiplin; 7. Nota Dinas Permohonan Penandatanganan Rancangan Keputusan Gubemur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin; 8 Keputusan Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin 9. Penyampaian Keputusan Gubemur kepada SKPD terkait;	a. Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara.	a. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan; dan p. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan penegakan hukum; dan b. Dapat membuka	a. Melindungi proses penegakan hukum; dan b. Melindungi rahasia pribadi seseorang.	Dasar hukum ditambahkan Pasal 17 huruf a UU 14/2008
20,	Status Hukum Tanah yang terdiri atas: Nama Pemilik, Dasar Hukum Kepemilikan, Lokas, dan Luas Tanah	a. Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data	Melindungi Keamanan Data dan Informasi Status Tanah	kenapa dirahasiakan? bukankah harusnya terbuka agar orang dapat terang mengetahui siapa pemilik tanah ketika ingin melakukan jual beli misalkan? bukankah fungsi dilaporkan ke kantah/kelurahan sebagai bentuk pengumuman atas kepemilikan?
21,	Informasi Kondisi Bangunan	Pasal 17 huruf i Undang-	a. 5 tahun; dan	a. Dapat mengungkap kondisi	Melindungi kerahasiaan proses	
22,	Dokumen Persetujuan Rencana	Pasal 17 huruf h dan i	a. 5 tahun; C. Terbuka apabila mendapat	a. Dapat mengungkap rahasia	Melindungi data dan informasi	
23,	Dokumen dan kajian teknis Hasil Survei Bangunan	Pasal 17 huruf h dan i Undang Nomor 14 Tahun tentang Keterbukaan	a. 5 tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara C. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi/perusahaan: b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi/ perusahaan; dan C. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi pribadi atau perusahaan	
24,	Data Teknis Bangunan Gedung	Pasal 17 huruf b Undang-	a. 5 tahun;	a. Mengungkap kondisi sarana dan	a. Mengamankan hak atas	
25,	Dokumen Hasil Kajian Pertelaan	Pasal 17 huruf b dan i Undang Nomor 14 Tahun	a. 5 tahun; b. Terbuka apabila ada c. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.	a. Mengungkap kondisi sarana dan prasarana, serta data detail bangunan gedung yang dapat menimbulkan	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan b. Melindungi data dan informasi	
26,	Dokumen SPJ Keuangan yang	a. Pasal 17 huruf b Undang-2008 tentang Keterbukaan b. Pasal 17 huruf h angka 3 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Terbuka sampai Audit b. Terbuka apabila ada secara tertulis	a. Dapat menimbulkan oleh pihak-pihak yang tidak b. Dapat menimbulkan tidak sehat; C. Dapat menimbulkan	a. Mengamankan hak atas menghindari persaingan usaha b. Melindungi data dan	
27,	Surat Perintah Pencairan Dana	Pasal 17 huruf i Undang-	a. 10 Tahun; dan	Dapat menimbulkan	a. Menghindari	
28,	Surat Penyediaan Dana	Pasal 17 huruf i Undang-	a. 10 Tahun; dan	Dapat menimbulkan	a. Menghindari penyalahgunaan	

			b. Terbuka apabila ada		C. Menjaga keakuratan data dan	
29,	Laporan Keuangan Pemerintah	a. Pasal 17 huruf b dan i b. Pasal 17 huruf h angka 3 Keterbukaan Informasi C. Pasal 17 huruf i Undang-	a. Terbuka apabila hasil audit b. Terbuka apabila ada	a. Dapat menimbulkan potensi b. Dapat menimbulkan persaingan c. Dapat menimbulkan informasi pribadi seseorang; dan e. ketika dibuka dapat	a. Mengamankan hak atas b. Melindungi data dan informasi	Dasar hukum Pasal 17 huruf i UU 14/2008
30,	Status hukum gedung dan	Pasal 17 huruf i Undang-	Terbuka apabila ada perintah	Dapat menimbulkan	Melindungi Keamanan Data dan	
31, 32,	Dokumen pemenuhan persyaratan Dokumen persyaratan pada Dokumen Arsip Perizinan Ruang dan bangunan yang meliputi; 1. Izin mendirikan Bangunan (IMB); 2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF); 3. Kelayakan Menggunakan Bangunan (KMB); 4. Izin Penggunaan Bangunan (IPB); 5. Keterangan Selesai Membangun	Pasal 17 huruf b, huruf g Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbuka apabila : a. 5 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada izin dari pemohon perizinan; c. Terbuka apabila ada permintaan/perintah dari aparat penegak hukum; dan d. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis	a. Dapat menghambat a. Dapat menghambat proses penerbitan izin; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan	a. Menjaga objektivitas a. Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan;dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.	